

ANALISIS PENILAIAN KONDISI KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2015-2019

Nuwun Priyono, Ari Nurul Fatimah, Risma Wira Bharata
Fakultas Ekonomi/Prodi D3 Akuntansi, Universitas Tidar
Email: ari.nurul.fatimah@untidar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze and assess trends in the financial condition of the Government of Magelang Regency which includes: financial factors and environmental factors. This study uses secondary data. The data analyzed includes data on financial reports in the Magelang Regency Government such as: balance sheet, APBD, budget realization reports, and operational reports. The analysis year period starts from 2015-2019. Analysis of the financial condition assessment using the Fiscal Tren Monitoring System (FTMS) model in the Magelang Regency Government. The research method used in this research is to use a descriptive approach based on secondary data processing and coupled with numerical analysis. The analysis technique in this research uses descriptive statistics, namely: presenting data in the form of tables, graphs, averages and percentage calculations. Analysis of the financial condition assessment using the FTMS model in Magelang Regency 2015-2019 shows that the financial factor includes 4 indicators consisting of 9 sub indicators. Of the 9 financial sub indicators, 5 sub indicators have the expected trend and 4 sub indicators have an unexpected trend. Furthermore, environmental factors consist of 1 indicator which includes 5 sub indicators. Of the 5 sub indicators, 2 sub indicators have the expected trend and 3 sub indicators have less expected trends for the assessment of the financial condition of the Magelang Regency government.

Keywords : *Assessment of Financial Conditions, financial factors, environmental factors, and the FTMS Model*

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.2347>

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini pemerintah kabupaten dan kotamempunyai otoritas yang luas dalam mengolah keuangan daerahnya. Kewenangan tersebut sejalan dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal sebagai dampak dari diterapkannya otonomi daerah pada kabupaten dan kota. Dengan melihat fakta tersebut, maka perlu adanya upaya penilaian terhadap kondisi keuangan yang ada di pemerintah kabupaten dan kota tersebut. Sehingga kondisi keuangan akan selalu dapat diawasi dan dapat dilihat sejauh mana kesehatan dari kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Dengan kondisi

keuangan yang dapat dinilai dan diawasi, diharapkan bahwa penggunaan keuangan daerah tersebut dapat digunakan secara optimal bagi penyelenggaraan program-program peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten/Kota saat sekarang ini merupakan sebuah daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam bidang keuangan, salah satunya adanya kebijakan desentralisasi fiskal. Kewenangan yang ada harus mendukung bagi terciptanya kondisi keuangan pemerintah daerah yang mendukung program-program pembangunan. Kondisi keuangan daerah bisa dilihat dari sejumlah indikator yang meliputi baik faktor internal maupun eksternal. Perlu banyak

upaya agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kondisi keuangannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan program kerja dan anggarannya. Terdapat beberapa sumber yaitu: sumber dari pengelolaan PAD maupun sumber lain yang dapat berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat maupun sumber pembiayaan lainnya. Kondisi keuangan pemerintah daerah mencerminkan kekuatan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya dalam rangka menjalankan program-program pembangunan.

Kabupaten Magelang ada di Propinsi Jawa Tengah. Dengan melihat kondisi geografis, Kabupaten Magelang merupakan daerah agraris. Kabupaten Magelang memiliki sektor jasa dan sektor industri dalam menopang perekonomiannya. Selain itu sektor wisata juga merupakan sektor yang menjadi andalan di Kabupaten Magelang, karena memiliki destinasi wisata dunia yaitu: Candi Borobudur. Kabupaten Magelang mempunyai luas wilayah 1.085,73 KM² dengan jumlah penduduk sebesar 1.279.625 jiwa (BPS, 2018).

Dibawah ini data mengenai jumlah realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Magelang selama periode tahun 2014-2018

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun	Kabupaten Magelang	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2014	1.655.674.485.031	1.655.060.222.422
2015	1.945.955.251.171	1.744.730.814.566
2016	2.036.310.089.428	2.073.797.409.332
2017	2.271.336.015.858	2.451.441.154.742
2018	2.302.190.543.616	2.486.540.561.169

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu

Dilihat dari tabel 1 realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magelang tersebut terlihat jelas bahwa selama lima tahun terakhir jumlah realisasi pendapatan daerah maupun belanja daerah terus meningkat. Peningkatan tersebut perlu dilakukan analisis dan kajian yang mendalam mengenai kondisi keuangan pemda tersebut.

Penelitian ini akan menganalisis dan menilai seberapa baik kondisi keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Magelang periode Tahun 2015-2019 khususnya dengan model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS)

Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) adalah sistem peringatan (deteksi) dini untuk memperkirakan kondisi keuangan pemda melalui analisis tren (kecenderungan) untuk beberapa indikator. FTMS dikembangkan oleh The International City/County Management Association (ICMA) pada tahun 1980. ICMA mengartikan kondisi keuangan pemda sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai layanan secara berkelanjutan (Ritonga, 2014: 84).

Ritonga (2014) menjelaskan bahwa FTMS mengukur kondisi keuangan pemda menggunakan dua faktor yaitu faktor keuangan dan faktor lingkungan. Masing-masing faktor mempunyai indikator yang diberi formula berbeda-beda. FTMS mengukur kondisi keuangan pemda menggunakan 11 faktor yang diuraikan kedalam 42 indikator. Dari kesebelas faktor tersebut, 6 faktor masuk dalam kategori faktor keuangan dan 5 faktor masuk kategori faktor lingkungan. Faktor keuangan terdiri dari: indikator pendapatan, belanja, posisi operasi, struktur hutang, hutang di danai, dan kondisi aktiva tetap. Faktor lingkungan terdiri dari indikator kebutuhan masyarakat dan sumberdaya, kendala/hambatan antar pemerintah, resiko bencana, kultur politik, kondisi ekonomi luar.

Tabel 2. Tren Beberapa Faktor Keuangan Fiscal Trend Monitoring System

Indikator	Sub Indikator	Formula	Trend Peringatan Dini
1. Pendapatan	Pendapatan per kapita	$\frac{\text{Pendapatan Operasional neto (harga konstan)}}{\text{Populasi (jumlah penduduk)}}$	↑
	Pendapatan pajak	$\frac{\text{Pendapatan pajak (harga konstan)}}{\text{Pendapatan operasional neto}}$	↓
	Surplus atau defisit pendapatan	$\frac{\text{Surplus atau defisit pendapatan}}{\text{Pendapatan operasional neto}}$	↑
2. Belanja	Belanja per kapita	$\frac{\text{Belanja operasional neto}}{\text{Populasi (jumlah penduduk)}}$	↑
	Belanja per fungsi	$\frac{\text{Belanja operasional (harga konstan)}}{\text{Total belanja operasional neto}}$	↑
	Pegawai per kapita	$\frac{\text{Jumlah pegawai pemda}}{\text{Populasi (jumlah penduduk)}}$	↑
	Belanja tetap	$\frac{\text{Belanja Tetap}}{\text{Belanja operasional neto}}$	↑
3. Posisi operasi	Surplus atau defisit operasional	$\frac{\text{Defisit atau surplus operasional dana umum}}{\text{Pendapatan operasional neto}}$	↓
	Posisi operasional pemda	$\frac{\text{Modal kerja pemda atau pendapatan operasional}}{\text{Kas dan investasi jangka pendek}}$	↓
4. Struktur hutang	Hutang jangka pendek	$\frac{\text{Hutang jangka pendek}}{\text{Pendapatan operasional neto}}$	↑
	Hutang jangka panjang	$\frac{\text{Hutang jangka panjang}}{\text{Assesed valuation, populasi, atau pendapatan personal}}$	↑
	Hutang didana	$\frac{\text{Hutang pensiun}}{\text{Gaji dan tunjangan}}$	↑
5. Kondisi aktiva tetap	Rotasi perca kerja	$\frac{\text{Total hutang untuk imbalan perca kerja}}{\text{Jumlah pegawai pemda}}$	↑
	Upaya pemeliharaan	$\frac{\text{Belanja pemeliharaan aset tetap (harga konstan)}}{\text{Jumlah kuantitas aset}}$	↓
	Belanja modal	$\frac{\text{Belanja modal dari dana operasional}}{\text{Belanja operasional neto}}$	↓

Sumber: Ritonga (2014)

Tabel 3. Tren Beberapa Faktor lingkungan Fiscal Trend Monitoring System

Indikator	Sub Indikator	Formula	Trend Peringatan Dini
1. Kebutuhan masyarakat dan sumber daya	Jumlah populasi	Jumlah populasi	↑
	Kepadatan penduduk	$\frac{\text{Jumlah populasi}}{\text{Luas wilayah dalam mil persegi}}$	↓
	Umur (populasi bawah umur 18 dan lebih 64)	$\frac{\text{Jumlah populasi dibawah 18 atau lebih 64}}{\text{Jumlah populasi}}$	↑
	Rumah tangga miskin atau penerima bantuan publik	$\frac{\text{Rumah tangga miskin penerima bantuan publik}}{\text{Rumah tangga dalam ribuan}}$	↑
	Kepemilikan rumah	Tingkat kepemilikan rumah	↓
	Pengangguran		↑
	Jumlah lapangan kerja di masyarakat		↓
2. Kendala hambatan antar pemerintah	Belanja wajib	$\frac{\text{Belanja wajib}}{\text{Total belanja operasional}}$	↑
	Belanja wajib		↑

Sumber: Ritonga (2014)

Laporan keuangan dianggap sebagai hal yang paling penting oleh pihak eksternal dalam menggambarkan kondisi keuangan pemda. Laporan keuangan pemda harus disusun mengacu pada SAP (Winarna & Murni, 2014). Untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi kualitas, laporan keuangan daerah wajib memenuhi 4 syarat yaitu relevan, andal, mudah dibandingkan, dan mudah dipahami (Pradono & Basukianto, 2015).

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah meliputi : LRA (Laporan Realisasi Anggaran), SAL (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), Neraca, LO (Laporan Operasional), LAK (Laporan Arus Kas), LKE (Laporan Perubahan Ekuitas) dan CaLK

(Catatan atas Laporan Keuangan). Pada Pernyataan SAP sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 dinyatakan bahwa Pemda harus mempunyai komitmen dalam menggunakan basis akrual (accrual basis) dalam setiap pencatatan dan pembukuan laporan keuangan.

Sedangkan menurut Firdaus & Ritonga (2018), laporan keuangan pemerintah meliputi: neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), dan laporan arus kas (LAK). Laporan keuangan pemda dapat dijelaskan sebagai kondisi/keadaan yang saling berhubungan atau berkaitan antar komponen (unsur) dalam satulaporan maupun unsur dalam satu komponen laporan keuangan pemda.

Mahmudi (2010:9), menyebutkan bahwa meskipun laporan keuangan sudah mempunyai sifat *general purposive* (tujuan umum), artinya dibuat lebih umum dan dibuat sederhana mungkin dalam memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, akantetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami dan menguasai laporan keuangan tersebut dengan baik.

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdapat komponen pendapatan daerah yang dapat berasal dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer (perimbangan) dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan yang berasal dari LRA merupakan penerimaan kas dari Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas pemerintah lainnya yang dapat menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali pemerintah (PSAP No 2. Paragraf 7 dalam Ritonga dan Suhartono, 2016). Sedangkan pendapatan yang berasal dari laporan operasiona (LO) adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (PSAP No 12 , paragraph 8). Pendapatan pemerintah daerah dapat berasal dari: PAD maupun penerimaan lain daerah yang sah.

Menurut Halim & Kusufi (2013), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah anggaran pemerintah daerah, yang memiliki unsur-unsur yaitu: rencana kegiatan daerah beserta uraian rincian lengkap. Adanya sumber penerimaan/pendapatan yang menjadi target minimal dalam menutupi biaya-beban berhubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut dan adanya beban yang menjadi batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang dicantumkan dalam bentuk angka serta periode anggaran biasanya 1 tahun.

Menurut PSAP No 02, paragraph 34 dalam Ritonga dan Suhartono (2016) belanja digolongkan kedalam kelompok/klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokan belanja yang mendasarkan pada jenis belanja dalam melaksanakan suatu aktifitas. Penggolongan atau pengklasifikasian ekonomi bagi pemerintah daerah yaitu: belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pengeluaran bunga, pengeluaran subsidi, dana hibah, belanja tak terduga dan bantuan sosial. Sedangkan klasifikasi berdasarkan organisasi merupakan penggolongan atau klasifikasi berdasarkan unit organisasi pemakai anggaran. Klasifikasi berdasarkan fungsi merupakan pengklasifikasian yang berpedoman pada fungsi-fungsi utama pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah harus mampu digunakan secara optimal dan maksimal dalam menjalankan program pemda. Contoh: belanja pelayanan umum, belanja perlindungan lingkungan hidup dan perumahan, belanja permukiman, belanja pertahanan, ketertiban dan keamanan, serta belanja ekonomi. Penelitian mengenai kondisi keuangan Kota Magelang pernah dilakukan oleh Maizunati (2017), hasil penelitian membuktikan bahwa monitoring kesehatan keuangan secara periodik adalah suatu hal yang wajib dilakukan dalam menciptakan suatu *early warning system* (sistem peringatan dini) pada berbagai kemungkinan di masa yang akan datang baik dari sisi ekonomi makro, sosial maupun politik. Dengan melakukan analisis deskriptif menggunakan metode indeks komposit kondisi keuangan dan klasterisasi Pemda dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum pengelolaan keuangan di Kota Magelang cukup baik jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada didalam Klaster 3. Kemudian Suryani dan Faizal (2016) meneliti mengenai kondisi keuangan Kabupaten/Kota di Aceh dan Sumatera Utara menunjukkan bahwa melihat hasil uji hipotesis dan analisis data penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kabupaten/ kota di propinsi Aceh memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari pada kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah kabupaten/kota di propinsi Aceh secara umum mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan lebih baik. Sedangkan Suwanto (2016), juga melakukan penelitian mengenai kondisi keuangan pemda dengan metode klaster. Dalam penelitian terdapat dua klaster sehat dan tidak sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam klaster yang tidak sehat unggul pada komponen indeks kemahalan konstruksi dan luas wilayah serta dominan pada sektor pertanian dan pariwisata. Kemudian pada klaster kedua dengan kriteria sehat, unggul signifikan disemua komponen Dana Alokasi Uumum (DAU) dengan pengecualian pada komponen luas wilayah dan indeks kemahalan

konstruksi. Penentuan dua klaster sehat dan tidak sehat ini mampu melihat dan menilai dengan detail mengenai kondisi keuangan yang ada dipemerintah daerah. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Sumual, dkk (2017), menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2013 sampai 2016 Kota Tomohon telah meraih predikat sebagai Kota yang efektif karena telah banyak target yang dicapai, akan tetapi jika dilihat dari pertumbuhan kemandirian dan efisiensi pada Kota Tomohon belum memenuhi standar yang diinginkan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada Kota Tomohon kurang baik.

Penelitian oleh Clark (1994) dalam Ritonga (2014), menyebutkan ada beberapa faktor penyebab tekanan keuangan. Faktor-faktor ini adalah: jumlah penduduk dan basis ekonomi, kepemimpinan politik, lembaga masyarakat, kelompok-kelompok etnis, dan struktur hukum. Sedangkan menurut Nollenberger et.al (2004) dalam Ritonga (2014), menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan daerah, yaitu: faktor lingkungan, faktor organisasi dan faktor keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengolahan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengumpul data dan telah dipublikasikan pada pengguna data (Kuncoro, 2011). Penelitian ini menggunakan data seperti: Neraca, APBD, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional. Data keuangan juga diperoleh melalui website: sibata.magelangkab.go.id. Selain itu data juga diperoleh dari website BPS.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Santoso (2000) dalam Kuncoro (2011), umumnya bidang studi statistik deskriptif menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik, kemudian meringkas dan menyampaikan data tersebut dalam bentuk tendensi sentral, variasi dan bentuk. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Magelang dengan periode waktu 2015-2019.

Data dalam penelitian ini berupa data keuangan dan data non keuangan. Adapun data keuangan yaitu: Data APBD Kabupaten Magelang selama periode waktu 5 tahun dari tahun 2015-2019, data Neraca Kabupaten Magelang tahun 2015-2019, data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Magelang 5 tahun (2015-2019) dan data Laporan Operasional Kabupaten Magelang tahun 2015-2019.

Sedangkan data lain dari penelitian ini yaitu: data inflasi dan data tenaga kerja di wilayah

Kabupaten Magelang, data rumah tangga miskin/penerima bantuan publik Kabupaten Magelang, data jumlah populasi Kabupaten Magelang dan data luas wilayah Kabupaten Magelang

Menurut Sugiyono (2009), dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Teknik ini adalah melakukan analisis data dengan cara deskriptif atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau digeneralisasi. Termasuk penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran sampai dengan perhitungan persentase. Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan statistik deskriptif, dilakukan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap nilai rasio yang ada dalam faktor keuangan dan juga nilai rasio dari faktor lingkungan. Penilaian faktor keuangan dan faktor lingkungan Pemda Kabupaten Magelang menggunakan Fiscal Trend Monitoring System (FTMS). Kemudian hasilnya dianalisis dari tahun ke tahun terhadap kondisi keuangan Pemda Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini tidak semua faktor keuangan dan faktor lingkungan dilakukan analisis penilaian kondisi keuangan pemda karena keterbatasan data penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Ada beberapa model yang dapat digunakan dalam penilaian kondisi keuangan pemda, diantaranya adalah: model kloha, Weissert, Kleine, model brown dan model FTMS. Dalam penelitian ini menggunakan model FTMS dalam melakukan penilaian kondisi keuangan pemda Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini tidak semua indikator/kriteria yang ada dalam model tersebut akan menjadi bahan referensi dalam melakukan analisis penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah. Data-data penelitian yang ada sudah dapat digunakan dalam melakukan analisis dan penilaian kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Magelang khususnya dengan menggunakan model FTMS dengan periode waktu pengamatan tahun 2015-2019.

Dalam model FTMS tersebut, data menunjukkan 4 indikator yang ada dalam faktor- faktor keuangan yaitu: pendapatan, belanja, posisi operasi dan struktur hutang, yang meliputi 9 sub indikator dari faktor-faktor keuangan tersebut. Dari sub indikator tersebut, memiliki formula/rumus dalam menentukan nilai sub indikator tersebut. Kemudian untuk faktor-faktor lingkungan mempunyai 1 indikator kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang terdiri dari 5 sub indikator. Masing-masing indikator tersebut terdapat formula dalam perhitungannya.

FTMS Faktor Keuangan Kabupaten Magelang

Penilaian kondisi keuangan Kabupaten Magelang dengan menggunakan model FTMS dengan melihat faktor keuangan dari tahun 2015-2019. Faktor-faktor keuangan ini harus dilakukan penilaian secara detail, karena memiliki indikator – indikator dan sub indikator yang mencerminkan kondisi keuangan yang ada di pemerintah Kabupaten Magelang. Dibawah ini merupakan data – data hasil penelitian model FTMS faktor keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Tabel 4. FTMS Faktor Keuangan Kabupaten Magelang

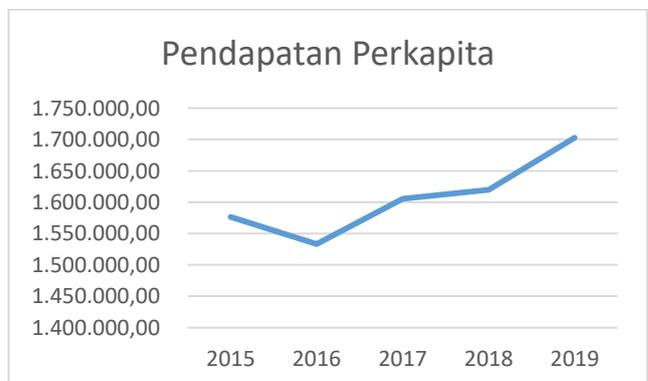
Kategori	Indikator	Formula	2015	2016	2017	2018	2019	Trend Keuangan %
			Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	
1. Pendapatan	Pendapatan perkapita	$\frac{\text{Pendapatan Daerah (Rp) (Y)} / \text{Populasi (Rp)}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{)}}$	1.576.264,00	1.533.444,24	1.600.533,41	1.618.804,41	1.702.708,81	↑
	Pendapatan pajak	$\frac{\text{Pendapatan Pajak (Rp) (Y)}}{\text{Populasi (Rp)}}$	85.200.880.000,00	85.770.348.000,00	93.173.177.000,00	93.200.240.000,00	100.124.250.000,00	↑
	Angka serah terima pendapatan	$\frac{\text{Angka serah terima pendapatan (Rp)}}{\text{Pendapatan (Rp)}}$	0,18	0,09	0,09	0,09	0,09	↑
2. Belanja	Belanja per kapita	$\frac{\text{Belanja (Rp) (Y)} / \text{Populasi (Rp)}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{)}}$	1.137.208,00	1.087.204,88	1.174.381,24	1.144.877,18	1.270.833,00	↑
	Belanja per fungsi	$\frac{\text{Belanja (Rp) (Y)}}{\text{Populasi (Rp)}}$	113.720.800,00	108.720.488,00	117.438.124,00	114.487.718,00	127.083.300,00	↑
	Belanja per pegawai	$\frac{\text{Belanja (Rp) (Y)}}{\text{Pegawai (Rp)}}$	0,07	0,11	0,09	0,10	0,08	↑
3. Posisi operasi	Angka serah terima operasi	$\frac{\text{Angka serah terima operasi (Rp)}}{\text{Pendapatan (Rp)}}$	0,11	0,08	0,10	0,10	0,10	↑
	Saldo rekening operasional dana umum	$\frac{\text{Saldo rekening operasional dana umum (Rp)}}{\text{Pendapatan (Rp)}}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	↑
4. Struktur hutang	Saldo rekening hutang	$\frac{\text{Saldo rekening hutang (Rp)}}{\text{Pendapatan (Rp)}}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	↑
	Saldo rekening hutang per kapita	$\frac{\text{Saldo rekening hutang (Rp)}}{\text{Populasi (Rp)}}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	↑

Sumber: sibata.magelangkab.go.id (olahan)

Di dalam faktor keuangan indikator pendapatan terdapat sub indikator pendapatan per kapita. Dalam sub indikator ini, jika dilihat data pada Tabel 4 diatas, hasil formula sub indikator tersebut mempunyai nilai yang cenderung meningkat.

Tren peningkatan ini mencerminkan bahwa sub indikator pendapatan per kapita mempunyai tren yang diharapkan. Pada sub indikator pendapatan pajak juga memiliki tren yang positif yang berarti mencerminkan kondisi yang diharapkan. Namun ada beberapa sub indikator, jika dilihat dari tabel 4 diatas, yang mempunyai tren yang kurang diharapkan yaitu: sub indikator belanja per fungsi yang selalu mengalami kenaikan nilai rasionya.

Grafik 1. Sub Indikator Pendapatan Per Kapita



Grafik 1 diatas menunjukkan bahwa sub indikator pendapatan per kapita memiliki hasil tren yang meningkat. Dari tahun 2015-2016

mengalami penurunan sedikit. Akan tetapi pada tahun 2016-2019 menunjukkan hasil yang meningkat. Ini menunjukkan bahwa terjadi tren positif karena selalu meningkat dan bisa diartikan bahwa sub indikator pendapat per kapita memiliki tren yang diharapkan.

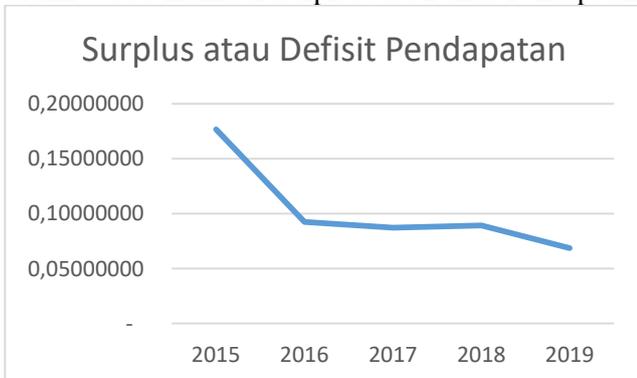
Kemudian pada grafik 2. Sub indikator pendapatan pajak menunjukkan nilai tren yang selalu meningkat. Khususnya di tahun 2016-2019 memiliki angka yang selalu meningkat. Ini menunjukkan bahwa sub indikator pendapatan pajak memiliki tren yang diharapkan. Pendapatan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Sehingga sumber penerimaan ini bisa dioptimalkan agar hasilnya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Grafik 2. Sub Indikator Pendapatan Pajak



Grafik 3 menunjukkan sub indikator surplus atau deficit pendapatan Kabupaten Magelang dari tahun 2015-2016 selalu mengalami penurunan. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa sub indikator surplus atau deficit pendapatan mencerminkan kondisi yang diharapkan. Karena setiap tahunnya terjadi surplus atau deficit pendapatan yang selalu menurun.

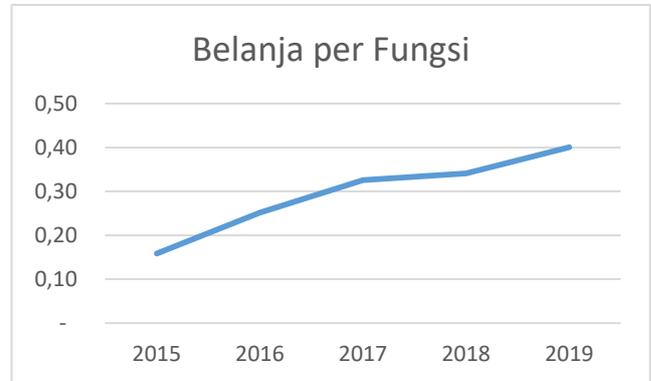
Grafik 3. Sub Indikator Surplus atau Defisit Pendapatan



Tabel 4 diatas menunjukkan sub indikator belanja per kapita yang cenderung menunjukkan nilai yang meningkat. Walaupun nilai dari tahun ke tahun

mengalami kenaikan atau penurunan, tetapi secara menyeluruh cenderung nilainya meningkat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sub indikator belanja per kapita masuk dalam kategori yang kurang diharapkan.

Grafik 4. Sub Indikator Belanja per Fungsi



Grafik 4 diatas menunjukkan bahwa nilai sub indikator belanja per fungsi mengalami tren peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sub indikator tersebut kurang diharapkan bagi kondisi keuangan di Kabupaten Magelang. Namun sebaliknya nilai sub indikator belanja tetap mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sub indikator ini dalam kondisi yang diharapkan bagi penilaian kondisi keuangan Pemda Kabupaten Magelang. Dalam indikator posisi operasi ada dua sub indikator yaitu: surplus atau deficit operasional dan likuiditas. Pada sub indikator surplus atau deficit operasional dari tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sub indikator ini masih dalam kategori diharapkan. Sedangkan sub indikator likuiditas dari tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa sub indikator likuiditas dalam kategori yang kurang diharapkan. Walaupun ada kenaikan nilai pada tahun 2015-2016. Terakhir, dalam indikator struktur hutang, yang meliputi sub indikator hutang jangka pendek mempunyai nilai yang cenderung konstan dari tahun 2015-2019.

FTMS Faktor Lingkungan Kabupaten Magelang

Data faktor-faktor lingkungan Kabupaten Magelang jika dilihat dari model FTMS dalam periode waktu Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

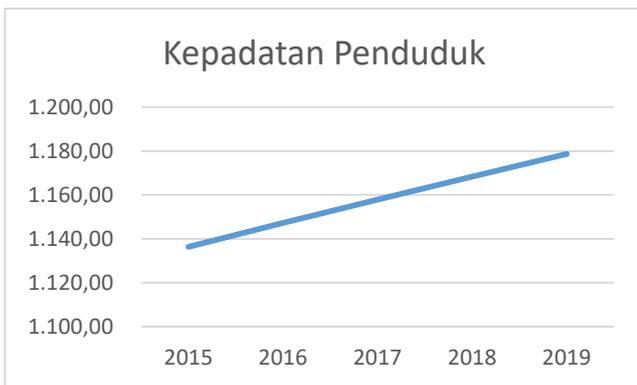
Tabel 5. FTMS Faktor Lingkungan Kabupaten Magelang

Indikator	Sub Indikator	Fungsi	Sifat Program	2015		2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	Target								
1	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk	71	1.233.691,00	1.243.180,00	1.237.222,00	1.248.396,00	1.237.222,00	1.248.396,00	1.237.222,00	1.248.396,00	1.237.222,00	1.248.396,00
	Kepada dari penduduk	Jumlah penduduk Usia 0-17 tahun	4	1.082,73	1.082,73	1.082,73	1.082,73	1.082,73	1.082,73	1.082,73	1.082,73	1.082,73	1.082,73
		Jumlah penduduk usia 18-64 tahun	1	314.812,00	314.812,00	314.812,00	314.812,00	314.812,00	314.812,00	314.812,00	314.812,00	314.812,00	314.812,00
		Jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas	1	1.233.691,00	1.243.180,00	1.237.222,00	1.248.396,00	1.237.222,00	1.248.396,00	1.237.222,00	1.248.396,00	1.237.222,00	1.248.396,00
		Pengangguran		3.708,00	3.864,00	3.893,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00

Sumber: BPS (Olahan)

Tabel 5 diatas menunjukkan data faktor lingkungan Model FTMS Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019. Dalam faktor lingkungan ini memiliki 1 indikator kebutuhan masyarakat dan sumber daya serta memiliki 5 sub indikator yang terdiri dari: jumlah penduduk, kepadatan penduduk, umur, pengangguran dan jumlah lapangan kerja dimasyarakat. Sub indikator jumlah penduduk dari tahun 2015-2019 memiliki nilai tren yang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kondisi yang diharapkan bagi kondisi keuangan pemda Kabupaten Magelang, karena jumlah penduduk yang mengalami kenaikan dapat menjadi modal dalam mendukung peningkatan produktifitas daerah tersebut. Kemudian berdasarkan grafik 5 mengenai sub indikator kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang mengalami tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan kondisi yang di harapkan. Karena dengan jumlah kepadatan penduduk yang meningkat dapat mendukung tersedianya sumber daya manusia dalam menunjang program-program pembangunan daerah tersebut.

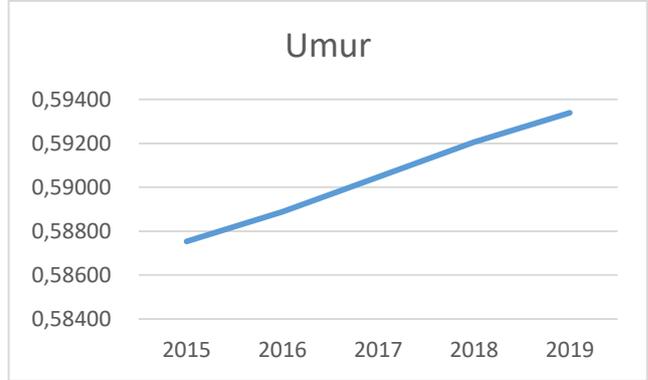
Grafik 5. Sub Indikator Kepadatan Penduduk



Pada grafik 6 terlihat nilai sub indikator umur yang nilainya selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019. Ini menunjukkan kondisi yang kurang diharapkan, dikarenakan jumlah penduduk yang berumur dibawah 18 tahun dan diatas 64 tahun cenderung meningkat, yang dapat mengurangi tingkat produktifitas daerah. Melihat nilai sub indikator jumlah pengangguran dari tahun 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan, walaupun ada beberapa tahun yang turun, akan tetapi nilainya cenderung meningkat. Ini menunjukkan kondisi yang kurang diharapkan. Sub indikator terakhir adalah jumlah lapangan kerja

dimasyarakat dari tahun 2015-2019 cenderung menurun. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang diharapkan bagi kondisi keuangan pemda Kabupaten Magelang jika dilihat dari model FTMS.

Grafik 6. Sub Indikator Umur



3.2 Pembahasan

Tren FTMS Faktor Keuangan Kabupaten Magelang tahun 2015-2019

Dalam penilaian kondisi keuangan dengan model FTMS terdapat 4 indikator utama faktor keuangan yang mencakup 9 sub indikator. Dari 9 sub indikator tersebut, terdapat 5 sub indikator yang masuk tren yang diharapkan bagi penilaian kondisi keuangan Kabupaten Magelang dan 4 sub indikator yang termasuk dalam tren kurang diharapkan. Adapun ke 9 indikator yang diharapkan maupun kurang diharapkan dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Tren FTMS Faktor Keuangan Kabupaten Magelang tahun 2015-2019

No	Indikator	Sub Indikator	Tren	Tahun
1	Pendapatan	Pendapatan per kapita	Diharapkan	2016-2019
		Pendapatan pajak	Diharapkan	2016-2019
		Surplus atau defici pendapatan	Diharapkan	2015-2019
2	Belanja	Belanja per kapita	Kurang diharapkan	-
		Belanja per fungsi	Kurang diharapkan	-
		Belanja tetap	Diharapkan	2016-2019
3	Posisi Operasi	Surplus atau defici operasional	Diharapkan	2016-2019
		Likuiditas	Kurang diharapkan	-
4	Struktur Hutang	Hutang jangka pendek	Kurang diharapkan	-

Berdasarkan tabel 6 diatas, terlihat bahwa dari 9 sub indikator, hanya 1 sub indikator surplus dan deficit pendapatan yang mempunyai tren yang diharapkan selama 5 tahun dari periode 2015-2019. Sedangkan 4 sub indikator yang meliputi: sub indikator pendapatan per kapita, pendapatan pajak, belanja tetap dan surplus atau deficit operasional memiliki tren yang diharapkan, akan tetapi tidak selama 5 tahun berturut-turut. Kondisi pada tren yang diharapkan hanya selama

4 tahun yaitu: tahun 2016-2019. Artinya di 4 tahun terakhir kondisi keuangan pemda Kabupaten Magelang dalam kondisi yang baik. Selanjutnya terdapat 4 sub indikator yang memiliki tren yang kurang diharapkan yaitu: belanja per fungsi, belanja per kapita, likuiditas dan hutang jangka pendek. Kondisi keuangan yang kurang diharapkan pada 4 sub indikator tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangan daerahnya. Belanja per fungsi dan belanja per kapita harus dilakukan pengawasan dan control sehingga nilainya dari tahun ke tahun tidak cenderung meningkat. Sedangkan likuiditas diusahakan tidak cenderung menurun dari tahun ketahun selama periode tahun 2015-2019.

Tren FTMS Faktor Keuangan Kabupaten Magelang tahun 2015-2019

Tabel 7. Tren FTMS Faktor Lingkungan Kabupaten Magelang tahun 2015-2019

No	Indikator	Sub Indikator	Tren	Keterangan
1	Kebutuhan Masyarakat dan Sumber daya (jumlah penduduk)	Populasi (jumlah penduduk)	Diharapkan	2015-2019
		Kepadatan Penduduk	Diharapkan	2015-2019
		Umur	Kurang Diharapkan	-
		Pengangguran	Kurang Diharapkan	-
		Jumlah Lapangan kerja	Kurang Diharapkan	-

Berdasarkan tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa indikator faktor lingkungan yang meliputi indikator kebutuhan masyarakat dan sumber daya, terdapat 2 sub indikator yang memiliki tren yang diharapkan. Sub indikator tersebut adalah populasi dan kepadatan penduduk. Sedangkan 3 sub indikator memiliki tren yang kurang diharapkan. Adapun sub indikator tersebut yaitu: umur, pengangguran dan jumlah lapangan kerja. Dari faktor lingkungan yang ada di Kabupaten Magelang, sebanyak 2 sub indikator populasi dan kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung bagi kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Sedangkan sub indikator umur, pengangguran dan jumlah lapangan kerja masih belum mampu menjadi faktor pendukung bagi kondisi keuangan pemda Kabupaten Magelang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor Keuangan dalam model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) pada Kabupaten

Magelang Tahun 2015-2019, memiliki 4 indikator yang meliputi 9 sub indikator

2. Faktor Lingkungan dalam model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019, memiliki 1 indikator yang meliputi 5 sub indikator
3. Faktor keuangan dalam model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) Kabupaten Magelang pada periode 2015-2019 memiliki 5 sub indikator yang diharapkan dan 4 sub indikator yang kurang diharapkan.
4. Faktor lingkungan dalam model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) pada Kabupaten Magelang pada periode 2015-2019 memiliki 2 sub indikator yang diharapkan dan 3 sub indikator yang kurang diharapkan.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Magelang lebih fokus dalam memperbaiki kinerja keuangannya pada beberapa sub indikator baik dalam faktor keuangan maupun faktor lingkungan yang masih dalam kategori kurang diharapkan, agar dalam penilaian kondisi keuangannya dapat masuk pada kategori yang diharapkan.
2. Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan langkah-langkah dalam optimalisasi perbaikan sub indikator khususnya dalam faktor keuangan seperti: belanja per kapita, belanja per fungsi, likuiditas dan hutang jangka pendek.
3. Penelitian yang akan datang diusahakan menggunakan semua sub indikator yang ada dalam model FTMS dan juga membandingkan dengan model penilaian kondisi keuangan yang lain, seperti: metode kloha dan metode brown.

REFERENSI

- BPS.2018. Kabupaten Magelang dalam Angka 2018
 BPS.2019. Kabupaten Magelang dalam Angka 2019
 BPS.2020. Kabupaten Magelang Dalam Angka tahun 2020
 Clark, TN. 1994. *Municipal fiscal strain: indicators and causes*. Government Finance Review, vol 10, pp.27-27
 Firdaus, M. A., & Ritonga, I. T. (2018). *Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik, 1(1), 68. <https://doi.org/10.22146/jaap.35336>
 Halim, A & Kusufi, MS. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan daerah*. Edisi Empat. Penerbit Salemba. Jakarta
 Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Keempat. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta

- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Penerbit UPP STIM YKPN
- Maizunati, NA. 2017. *Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali*. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan. Vol 2. No 2 April 2017. Fakultas Ekonomi Universitas Tidar
- Nollenberger, K, et.al.2003. *Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government*, Washington DC, Internasional city country managers association.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Th 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Pradono, F. C., & Basukianto. (2015). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 22(2), 1–13.
- Ritonga, Irwan Taufiq.2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ritonga, IT & Suhartono, E. 2016. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Lanjutan*. Cetakan 1. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan kedelapan. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sumual, Cristian D. dkk .2017. *Analisis Pengukuran Kinerja Pada Kota Tomohon*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2), 2017, 782-791
- Surjono, W., & Nova Roslina Firdaus, N. (2017). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (Dppk) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 5(1), 1357–1368. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6737>
- Suryani & Faisal, HB. 2016. *Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh Dan Di Sumatera Utara*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2016, Hal. 63 – 71 Vol. 23, No.1 63 ISSN: 1412-3126
- Suwanto, A. 2016. *Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Dengan Metode Klaster*. Tesis. Maksi. FEB UNS
- Winarna, J., & Murni, S. (2014). *Persepsi User Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Eks-Karisidenan Surakarta)*. Journal of Rural and Development, V(1), 81–96.